

# Analisis Kebijakan Luar Negeri Armenia Azerbaijan Terkait Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh Menurut Teori John P.Lovell

Afeysya Devany

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*  
Email : [Afeyshad@upnvj.ac.id](mailto:Afeyshad@upnvj.ac.id)

Nuraisya Afifa Abratiputri

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*

Radendy Ahmad Ilmisani

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*

## Abstract

*The conflict between Armenia-Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh territory has been occurring for decades. There is a dispute over the seizure of the Nagorno-Karabakh territory. The territory is occupied by ethnic Armenians but is in the territory of Azerbaijan. The ethnic Armenians demanded a transfer of power from Azerbaijan to Armenia, which Azerbaijan refused to do. Nor did the Soviet Union give the territory to Armenia. After the Soviet Union collapsed, Armenia considered the jurisdiction of the Soviet Union no longer in effect. This caused a conflict which is still ongoing. The author uses a realist perspective to analyze the role of Armenia-Azerbaijan, where state sovereignty is an important point that needs to be defended and military power is the main force. The two countries released a similar foreign policy. They both believe that they are in an equal strength position. Furthermore, they can cease each other's arms, such as shootouts after the 2008 Armenian elections and other ceasefire events. This conflict can be explained by John P. Lovell's strategic theory, the confrontation strategy where the two countries confront each other. This occurs when the power of the states are equal.*

Konflik antara Armenia-Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh sudah berlangsung selama beberapa dekade. Terdapat sengketa terkait perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Wilayah tersebut ditempati oleh etnis Armenia namun berada di wilayah negara Azerbaijan. Etnis Armenia menuntut pemindahan kekuasaan dari

Azerbaijan ke Armenia yang tentu ditolak oleh pihak Azerbaijan. Uni Soviet pun tidak memberikan wilayah tersebut kepada Armenia. Setelah Uni Soviet hancur, Armenia menganggap yurisdiksi Uni Soviet tersebut sudah tidak lagi berlaku. Hal tersebut menimbulkan konflik yang hingga saat ini masih berlangsung. Penulis menggunakan perspektif realis untuk menganalisis peran Armenia-Azerbaijan, dimana kedaulatan negara menjadi poin penting yang perlu dipertahankan dan kekuatan militer menjadi kekuatan utama. Kedua negara mengeluarkan kebijakan luar negeri yang hampir sama. Keduanya merasa berada pada posisi kekuatan yang seimbang, sehingga mereka melakukan gencatan senjata satu sama lain, seperti baku tembak setelah pemilu Armenia 2008 dan peristiwa gencatan senjata lainnya. Konflik ini dapat dijelaskan dengan teori strategi John P. Lovell yakni confrontation strategy yakni kedua negara saling melakukan konfrontasi. Hal ini terjadi ketika kekuatan negara adalah sama atau seimbang.

**Keywords:** Armenia-Azerbaijan; Nagorno-Karabakh; Territorial Dispute, confrontation strategy

## Pendahuluan

Azerbaijan dan Armenia merupakan negara yang terletak di Kaukasus Selatan. Dua negara ini adalah negara pecahan Uni Soviet yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya setelah kehancuran Uni Soviet. Dua negara ini telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan warga negaranya masing-masing. Selain itu, kemerdekaan keduanya telah diakui oleh dunia internasional. Dengan beberapa hal tersebut, kedua negara dinyatakan secara sah menjadi negara merdeka dan memiliki kedaulatannya sendiri.

Kepentingan nasional merupakan salah satu hal yang harus dijaga oleh setiap negara. Kedaulatan menjadi hal mutlak yang harus dilindungi oleh negara merdeka. Tak jarang terjadi konflik yang berkaitan dengan isu kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara. Begitu pun dengan Azerbaijan dan Armenia. Terdapat konflik penting yang dapat mengganggu stabilitas nasional dua negara tersebut. Hal ini menyebabkan dua negara saling serang dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi national interest masing-masing negara.

Konflik ini merupakan konflik terkait wilayah. Dimana wilayah kekuasaan negara merupakan poin utama dalam pembentukan suatu negara dan menjadi hal penting yang harus dijaga. Dua negara ini memperebutkan wilayah bernama Nagorno-Karabakh. Wilayah ini diklaim keduanya sebagai bagian dari wilayah mereka masing-masing. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik. Tidak mungkin terdapat satu wilayah yang dimiliki oleh dua negara.

Konflik ini telah lahir sejak beberapa dekade yang lalu. Sebelum kehancuran Uni Soviet, Armenia merupakan wilayah yang memiliki hak otonom dari pemerintahan Uni Soviet. Sedangkan Azerbaijan merupakan bagian dari Uni

Soviet. Pada 1923, Uni Soviet menetapkan Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari Azerbaijan dan memberikan status otonomi khusus bagi wilayah tersebut.

Titik permasalahan adalah wilayah Nagorno-Karabakh didominasi oleh masyarakat Armenia. Namun sebenarnya, wilayah ini berada pada wilayah administratif Azerbaijan dengan otonomi khusus sesuai dengan putusan dari Uni Soviet. Dengan keadaan tersebut, Armenia membuat permohonan kepada Uni Soviet untuk memindahkan kekuasaan daerah tersebut kepada Armenia. Permohonan transfer wilayah tersebut dilakukan pada tahun 1945, 1965, 1977, dan 1987. Namun, seluruh permohonan Armenia tersebut ditolak oleh pemerintah Uni Soviet. Maka, wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Azerbaijan.

Permasalahan mulai muncul kembali ke permukaan sejak naiknya Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet. Pada 1988, Gorbachev mulai menjalankan kebijakan glasnost dan perestroika. Kebijakan tersebut mulai membuka kebebasan negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini dimanfaatkan Armenia untuk kembali mengeluarkan permohonan untuk transfer wilayah Nagorno-Karabakh. Namun, permohonan tersebut kembali ditolak oleh pemerintah Uni Soviet. Konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh pun kembali memanas (Cornel, 1999).

Setelah kehancuran Uni Soviet pada 1991, keadaan mulai tidak stabil. Pemerintahan Uni Soviet dianggap telah selesai. Begitupun dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Nagorno-Karabakh menganggap keputusan Uni Soviet menolak transfer wilayah sudah tidak berlaku. Yurisdiksi keputusan tersebut sudah tidak lagi relevan karena pemerintahan Uni Soviet telah hancur.

Nagorno-Karabakh mendeklarasikan diri sebagai wilayah merdeka. Wilayah tersebut tidak lagi berada di bawah wilayah administratif dari Azerbaijan. Namun, Azerbaijan sebagai negara merdeka berusaha untuk mempertahankan wilayah tersebut di bawah kuasanya. Azerbaijan tidak membiarkan wilayah tersebut untuk membebaskan diri maupun bergabung dengan Armenia meskipun wilayah tersebut mayoritas diduduki oleh etnis Armenia. Selain itu, wilayah tersebut juga masih diduduki oleh pasukan Uni Soviet.

Pada 1992, pasukan Uni Soviet meninggalkan wilayah tersebut. Hal ini memicu konflik yang semakin panas. Perang pun sulit untuk dihindari oleh dua negara tersebut. Armenia melakukan serangan secara besar-besaran. Serangan tersebut berhasil mengusir ratusan ribu orang beretnis Azerbaijan dari wilayah Nagorno-Karabakh. Bahkan, pasukan Armenia mampu menduduki hampir 25% wilayah Azerbaijan. Azerbaijan pun juga melakukan serangan untuk mempertahankan wilayahnya dan menimbulkan ratusan ribu korban jiwa.

Keadaan semakin memanas dan diperlukan pihak ketiga dalam keadaan tersebut. Untuk menyelesaikan konflik yang saat itu sedang terjadi antara Armenia-Azerbaijan, dibentuklah Minsk Group oleh Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) pada tahun 1992 (Suleimany, 2009). Minsk Group berperan sebagai mediator untuk mencari solusi dari permasalahan dua negara tersebut hingga mencapai titik damai. Terdapat tiga negara dengan peran penting dalam upaya mediasi Armenia-Azerbaijan dalam Minsk Group. Negara-negara tersebut adalah Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Rusia sebagai wilayah bekas Uni Soviet berperan paling aktif dalam proses mediasi dua negara terkait. Dengan adanya Minsk Group, diharapkan konflik cepat mereda dan tidak terus memakan korban dan kerugian-kerugian lainnya. Baik di pihak Armenia maupun Azerbaijan.

Salah satu hasilnya adalah kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grachev. Dua negara ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata untuk menghentikan perang dan tindakan agresif masing-masing negara. Kesepakatan gencatan senjata ini kemudian ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Armenia dan Menteri Pertahanan Azerbaijan pada bulan Juli 1994 (Bartuzi, 2008).

Meskipun penandatanganan kesepakatan gencatan senjata telah disepakati, tetap saja pelanggaran masih terus dilakukan. Perang terus terjadi, pada tahun 2006 terdapat 600 pelanggaran. Setelah unjuk rasa Pemilu Armenia pada tahun 2008, kembali terjadi baku tembak. Armenia menuduh pasukan Azerbaijan memanfaatkan kerusuhan dan Azerbaijan menuduh Armenia melakukan pengalihan isu dari kerusuhan ke perbatasan. Resolusi 62/243 Majelis Umum PBB 2008 meminta pasukan Armenia mundur dari perbatasan. Namun, pelanggaran terus terjadi dan semakin meningkat hingga saat ini. Pada 2020, pertempuran pecah pada 27 September. Meletusnya konflik ini memakan ribuan korban jiwa. Armenia-Azerbaijan saling tuduh 'pelanggaran berat' gencatan senjata dan serangan sipil. Konflik mengalami situasi terparah sejak kesepakatan gencatan senjata 1994. Dua gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi oleh Rusia dan Perancis gagal. Pada 25 Oktober 2020, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan, dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov menyepakati gencatan senjata baru yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengolah data sehingga data dapat disajikan kepada pembaca secara utuh dan telah di analisis terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan data secara jelas menjadi bentuk tulisan agar dapat dipahami oleh pembaca.

Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari tulisan-tulisan terdahulu hingga tulisan yang terbaru tentang sengketa wilayah antara Armenia-Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Penulis kemudian mendeskripsikan data yang diperoleh dari sumber-sumber terkait dalam bentuk narasi kemudian menganalisis data yang telah diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca

### **Perspektif Realisme**

Realis melihat negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara juga berperan sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi hak mutlak negara yang tidak dimiliki oleh aktor lain (non-negara). Negara sebagai aktor rasional mengambil kebijakan yang memiliki nilai maksimum keuntungan dan menghindari kerugian. Selain itu, keamanan nasional menjadi poin utama dalam kepentingan nasional.

Realis bersikap pesimis pada hubungan internasional. Hubungan antar negara juga bersifat konfliktual dan saling curiga (Fukuyama, 2003). Konflik berasal dari sifat manusia yang ingin mendominasi manusia lainnya (Sorensen, 2003). Sifat egoisme negara juga tertera jelas dalam setiap pengambilan keputusan. Moralitas sulit diterapkan dalam hubungan politik internasional (Wardhani, 2014). Realisme menggunakan *power* sebagai poin utama dalam melihat keadaan politik internasional dan perhitungan pengambilan kebijakan. Konsep *power* digunakan untuk menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Perang menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik (Fukuyama, 2003).

### **Strategi Politik John P. Lovell**

Menurut John P. Lovell, dalam membuat strategi pengambilan keputusan terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi dibuat berdasarkan pengamatan strategi yang diambil oleh pihak lain. Pengambilan keputusan memperhatikan bagaimana pihak lain mengambil keputusan. Kedua, strategi dibuat berdasarkan pertimbangan tentang stabilitas nasional negara. Pengambilan keputusan mempertimbangkan keadaan domestik negara. Dengan dua faktor tersebut, strategi politik luar negeri dibagi menjadi empat tipe yakni *leadership strategy*, *concordance strategy*, *accommodation strategy*, dan *confrontation strategy*.

#### **1. Leadership Strategy**

Strategi ini diambil apabila kapabilitas negara lebih kuat dari pihak lain. Dengan kapabilitas yang lebih kuat, proses tawar-menawar akan lebih menguntungkan. Negara berusaha mengendalikan pihak lain dengan langkah-langkah persuasif karena posisinya yang lebih superior terhadap negara lain.

#### 2. *Concordance Strategy*

Strategi ini diambil apabila kapabilitas negara lebih lemah dari pihak lain. Negara akan berupaya menyelaraskan pihak yang lebih kuat. Negara bersifat lebih pasif. Proses tawar-menawar akan sulit dilakukan sehingga negara akan mengusahakan *win win solution* dan menghindari salah paham dalam prosesnya.

#### 3. *Accommodation Strategy*

Strategi ini diambil apabila kapabilitas negara lebih lemah dari pihak lain. Kapabilitas pihak lain menjadi ancaman bagi negara. Dengan keadaan seperti itu, negara menghadirkan pihak ketiga untuk menghindari kesalahpahaman dan membantu mencari solusi permasalahan. Kompromi dibutuhkan dalam strategi ini.

#### 4. *Confrontation Strategy*

Strategi ini diambil apabila kapabilitas negara lebih kuat dari pihak lain. Dengan kapabilitas yang lebih kuat, dapat dilakukan penajaman isu konflik sehingga mampu memaksa negara lain untuk mengakui superioritasnya dan konfrontasi dapat dilakukan

## **Pembahasan**

Konflik antara Azerbaijan dan Armenia terkait Nagorno-Karabakh terus berlarut-larut. Keruntuhan Uni Soviet menjadi pemicu kembali meledaknya konflik ini. Azerbaijan berlandaskan keputusan Uni Soviet yang memutuskan bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari wilayah administratifnya terus berupaya untuk mempertahankan wilayah tersebut. Keberadaan pasukan Armenia dianggap sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan negara. Armenia menganggap bahwa selama ini wilayah tersebut sudah diduduki oleh etnis Armenia. Selain itu, hancurnya Uni Soviet juga menjadi alasan untuk membatalkan keputusan tentang wilayah tersebut karena baik Armenia maupun Azerbaijan bukan lagi berada di bawah pemerintahan Uni Soviet. Atas dasar itu, maka yurisdiksi terkait wilayah Nagorno-Karabakh juga sudah tidak berlaku. Armenia berhak menduduki wilayah tersebut dan mendapatkan transfer kekuasaan dari Azerbaijan.

Dua negara berkonflik ini memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Apabila terjadi konflik, hal itu berdasarkan kepentingan nasional yang

harus dilindungi. Wilayah kekuasaan menjadi poin penting dari kepentingan nasional. Sengketa wilayah dapat mengganggu keamanan negara dan mengganggu stabilitas nasional.

Sesuai dengan perspektif realis, hubungan antar negara dalam politik internasional bersifat konfliktual. Dua negara ini saling mempertahankan apa yang mereka yakini benar atas nama negara masing-masing. Konflik terjadi karena dua negara ini saling klaim wilayah tersebut berdasarkan apa yang mereka yakini. Sulit untuk mencegah konflik timbul dan mencegah perang apabila dua negara ini memiliki kekuatan yang sama.

Kekuatan militer dikerahkan dua negara ini untuk menunjukkan dominasinya di wilayah Nagorno-Karabakh. Kekuatan militer ini juga lah yang menimbulkan korban jiwa di golongan masyarakat sipil. Armenia berhasil mengusir sekitar 500.000 etnis Azerbaijan di Nagorno-Karabakh dan melukai hak-hak asasi mereka. Armenia juga menduduki hampir 25 persen wilayah Azerbaijan yang tentu saja menjadi ancaman kedaulatan Azerbaijan. Azerbaijan menggunakan kekuatannya untuk mengusir pasukan Armenia di wilayah negaranya dan mengambil kembali wilayah yang sebelumnya sudah menjadi sengketa.

Pihak ketiga masuk untuk memberi mediasi untuk menyelesaikan konflik. Minsk Group OSCE yang berisi tiga negara (Amerika Serikat, Rusia, dan Perancis) ini terus berusaha memberikan jalan keluar untuk mengatasi konflik antara Armenia dan Azerbaijan ini. Apabila konflik ini terus berlanjut dan terus menimbulkan kerugian baik material maupun nonmaterial, maka kedamaian dalam sistem internasional pun akan terganggu dan akan berdampak bagi negara lain. OSCE sebagai organisasi internasional regional memiliki peran penting untuk membantu penyelesaian konflik.

Peran Minsk Group sangat diharapkan untuk dapat mencari titik damai permasalahan. Salah satu cara Minsk Group adalah memediasi Armenia dan Azerbaijan untuk segera mengakhiri konflik. Mediasi yang disponsori oleh Rusia menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1994 cukup untuk meredakan perang yang terjadi saat itu.

Keadaan tersebut tidak bertahan lama. "Perang bersifat abadi" (Fukuyama, 2003). Pelanggaran demi pelanggaran gencatan senjata terus terjadi di dua belah pihak. Keduanya menunjukkan dominasi kekuatan dan egoisme negara. Pengambilan keputusan yang dilakukan melahirkan perang senjata antara dua negara.

Salah satunya adalah ketika terjadi baku tembak setelah pemilu Armenia 2008. Politik domestik Armenia pada saat itu dalam kondisi tidak stabil. Terjadi permasalahan politik domestik di pusat negara sehingga mengganggu stabilitas negara. Sementara itu, terjadi baku tembak di wilayah Nagorno-Karabakh. Rasa

saling curiga timbul di antara dua negara. Armenia mengambil keputusan untuk menuduh Azerbaijan memanfaatkan keadaan politik domestik Armenia untuk melakukan serangan sedangkan Azerbaijan mengambil keputusan untuk menuduh Armenia melakukan pengalihan isu dari pusat ke perbatasan. Keputusan dua negara tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. *Setting* tersebut digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan (Snyder, 2003).

Dua negara ini memiliki kekuatan yang sama kuat. Baik Armenia maupun Azerbaijan berupaya untuk menunjukkan dominasinya satu sama lain. Maka dari itu, konflik sulit untuk dihentikan dan menemui titik damai. Dua negara ini membentuk sama-sama membentuk strategi yang sekiranya dapat menguntungkan negara masing-masing.

Keduanya menggunakan penajaman isu konflik untuk memenangkan konflik ini. Terutama yang berdasarkan dengan sejarah sebelumnya. Azerbaijan mengklaim wilayah tersebut berdasarkan keputusan Uni Soviet dan Armenia melakukan klaim berdasarkan keruntuhan Uni Soviet yang mempengaruhi legitimasi dari keputusan tersebut. Keduanya sama-sama mempertajam isu tersebut untuk memperkuat argumen mereka. Dengan argumen yang kuat, diharapkan mereka dapat memiliki kekuasaan yang kuat di wilayah Nagorno-Karabakh.

Selain itu, mereka memiliki kekuatan militer yang dapat dikatakan seimbang. Keduanya merupakan negara pecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaan setelah Uni Soviet runtuh. Kekuatan yang sama besar itu menyebabkan dua negara ini mengambil strategi konfrontasi untuk mendapatkan keuntungan dalam konflik ini. Strategi konfrontasi yang dilakukan oleh kedua negara menyulitkan penyelesaian konflik sehingga melibatkan pihak ketiga.

Sistem internasional yang anarki dan menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi menyebabkan hasil dari mediasi oleh pihak ketiga tetap saja dilanggar. Negara tidak terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran-pelanggaran pun terus terjadi. Dua negara terus menunjukkan egoismenya untuk menempati wilayah Nagorno-Karabakh.

Kesepakatan gencatan senjata dilakukan lagi pada 25 Oktober 2020 setelah *chaos* pada akhir September. Saling tuduh terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Keduanya saling menuduh bahwa pihak lawan dengan sengaja menyerang masyarakat sipil untuk memenangkan sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Baku tembak pada akhir September ini menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil dan konflik pun semakin memanas. Diperlukan kesepakatan gencatan senjata kembali untuk mencegah konflik mempengaruhi sistem internasional serta mengganggu stabilitas regional, khususnya eropa. Kali ini, mediasi dilakukan oleh Amerika Serikat yang memiliki *power* yang lebih kuat



dari dua negara ini. Kesepakatan ini disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan melalui menteri luar negerinya dan disaksikan oleh wakil menteri luar negeri Amerika. Namun, meskipun sudah terdapat kesepakatan gencatan senjata, kedua negara masih dengan keras menolak untuk disalahkan dan masih menuduh pihak lawan sebagai penyebab memanasnya konflik pada tahun ini. Setidaknya, dengan disepakatinya gencatan senjata telah ada aturan untuk menghentikan perang dan meredakan situasi yang memanas. Diharapkan hasil mediasi kali ini dapat bertahan lama dan pelanggaran-pelanggaran dari dua belah pihak dapat dicegah. Apalagi, dunia saat ini tengah dihadapkan dengan masalah pandemi Covid-19. Kesehatan masyarakatlah yang seharusnya menjadi prioritas bagi setiap negara.

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan pandangan realis yang melihat hubungan antar negara dalam sistem internasional bersifat konfliktual dan saling curiga, konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh sulit untuk dihindari. *Power* juga masih digunakan untuk menunjukkan dominasi antara pihak yang saling bertentangan. Selain itu, isu keamanan dan kedaulatan juga menjadi isu yang sangat diperhatikan. Sesuai dengan kasus sengketa wilayah Nagorno-Karabakh.

Pengambilan keputusan juga memerlukan pertimbangan yang matang. Snyder telah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan perlu memperhatikan keadaan internal dan eksternal negara. Hal ini ditunjukkan ketika kembali meletusnya konflik Nagorno-Karabakh setelah Pemilu Armenia 2008. Keduanya *statement* saling tuduh dengan mempertimbangkan keadaan politik domestik Armenia.

Strategi yang diterapkan oleh kedua negara juga memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan pertimbangan kekuatan yang seimbang, Armenia dan Azerbaijan sama-sama mengambil strategi konfrontasi. Isu-isu konflik di masa lalu menjadi dasar mereka melakukan konfrontasi. Selain itu, konfrontasi juga dilakukan untuk menunjukkan dominasi bagi pihak lawan. Penggunaan strategi konfrontasi inilah yang menyebabkan dua negara berperang dan sulit mencapai kesepakatan damai.

Pandangan realis bahwa sistem internasional bersifat anarki dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara ditunjukkan dengan keterlibatan pihak ketiga Minsk Group dalam konflik Armenia-Azerbaijan terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Meskipun mediasi oleh Minsk Group telah dilakukan, namun tetap saja terjadi pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mediasi terakhir dilakukan difasilitasi oleh Amerika Serikat dan disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan. Terdapat harapan bahwa

pelanggaran terhadap kesepakatan ini tidak terus terjadi dan konflik dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Perwita, Anak Agung Banyu. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suleymani, Nasrin. *An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem*. Turkey: Offset Co. Ltd Press, 2009.
- Asrudin, A. Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Global South Review*, 1(2; 2014), 107-122.
- Fatoni, M. A., & Rosyidin, M. Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia Dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh. *Journal of International Relations*, 5(3; 2019), 448-457.
- Febriani, H., Utomo, T. C., & Paramasatya, S. Isu Kejahatan Perang dalam Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh. *Journal of International Relations*, 1(1; 2018), 56-63.
- Olivia, Y. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*, 5(01; 2013), 890-907.
- Saeri, M. Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatis. *Jurnal Transnasional*, 3(02; 2012)1-19.
- Kristiani, E. A. *Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012*. Skripsi, Universitas Airlangga. 2015.
- Putra, R. H. *Peran Rusia Dalam Menangani Konflik Sengketa Wilayah Nagorno – Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan Periode 2010 – 2013*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2015.
- Medcom.id, 18 Oktober 2020. “Armenia dan Azerbaijan Sepakati Gencatan Senjata Baru”. <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/zNPZE3Pk-armenia-dan-azerbaijan-sepakati-gencatan-senjata-baru>. akses pada 4 November 2020.
- BBC News Indonesia, 23 Oktober 2020. *Konflik Armenia-Azerbaijan: Kedua kubu sepakati gencatan senjata yang diperantarai AS*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54655091>. akses pada 4 November 2020.